



Judul : Audit Hambalang - DPR Pertimbangkan Interpelasi
Tanggal : Senin, 19 Nopember 2012
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

AUDIT HAMBALANG

DPR Pertimbangkan Interpelasi

JAKARTA, KOMPAS — Rekomendasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara agar Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak bertanya atau interpelasi atas proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, masih dipertimbangkan fraksi-fraksi di Parlemen.

Hingga Sabtu (17/11), fraksi-fraksi belum secara resmi memutuskan untuk menerima atau menolak usulan penggunaan hak interpelasi pada pemerintah. Salah satunya, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN). Sekretaris F-PAN DPR Teguh Juwarno mengatakan, belum ada keputusan resmi fraksi terkait rekomendasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) soal interpelasi.

Namun, Teguh akan mendorong fraksi mendukung penggunaan hak interpelasi untuk me-

nanyakan mengenai tata kelola anggaran di kementerian. Interpelasi itu penting karena hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya permasalahan dalam tata kelola anggaran di kementerian.

Ada pelanggaran

Setidaknya ada pelanggaran UU dalam proses penganggaran dan pelaksanaan proyek di dua kementerian, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Keuangan. Pelanggaran UU juga dilakukan Badan Pertanahan Nasional.

Pelanggaran terutama terlihat dari pengajuan usulan anggaran tahun jamak (*multiyears*) yang hanya dilakukan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam (saat itu). Padahal, UU mengatur, kontrak tahun jamak dengan nilai proyek di atas Rp 50 miliar harus melalui

persetujuan menteri.

"Persetujuan anggaran *multi-years* juga hanya dilakukan oleh seorang dirjen (direktur jenderal), padahal seharusnya menteri," katanya.

Sama dengan F-PAN, Fraksi Partai Golkar (F-PG) juga belum menentukan sikap. "Kami akan merapatkan dulu, apakah interpelasi itu *urgent* atau tidak. Tunggu saja hari Senin," ujar anggota F-PG, Nurul Arifin.

Sementara itu, meskipun fraksinya belum menentukan sikap, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) M Arwani Thomafi berpendapat, rekomendasi BAKN agar DPR menggunakan hak interpelasi perlu ditanggapi serius dan ditindaklanjuti.

"Rekomendasi interpelasi itu kan sudah diputuskan BAKN, semua fraksi juga ada di situ. Maka saya berpikir, rekomendasi itu perlu diseriusi," tuturnya. (NTA)